



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR



Jl. Majapahit No. 3, Biak



<https://bappeda.biakkab.go.id>



@bappedabiak22



+6281299165164

Telp/Fax (0981) 21323

bappedabiak



@bappedabiak



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun kinerja pembangunan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Bappeda tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2022, sebagai instrumen guna mencapai tujuan strategi Bappeda periode 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangatlah ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme dari seluruh pegawai, dari pimpinan maupun staf, Keberhasilan pelaksanaan pula dapat dipengaruhi oleh lingkungan, arah kebijakan strategi organisasi maupun strategi perencanaan pembangunan, dan dokumen ini diharapkan menjadi bahan untuk penyusunan Renja Bappeda demi keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor khususnya di bidang perencanaan daerah, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja perangkat daerah.

Biak, 27 Maret 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor



**MICHAEL RONALD ISIR S.T**

PEMBINA TK.I

NIP. 19820304 200909 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	2
1.2    LANDASAN HUKUM .....	3
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II    EVALUASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2022 .....</b>	<b>7</b>
<b>2,1    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2022.....</b>	<b>8</b>
A    PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	16
B    PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.....	17
C    PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN .....	17
<b>2.2    ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA TAHUN 2022.....</b>	<b>18</b>
<b>2.3    ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA.....</b>	<b>20</b>
2.3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	20
2.3.2    ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA.....	22
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR.....</b>	<b>23</b>
3.1    TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL.....	23
3.2 <b>TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>34</b>
4.1    PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran.....	9
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	26
TABEL 3.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.....	28
TABEL 3.3	Dalam Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor.....	31
TABEL 3.4	Indikator Kinerja Utama (Iku) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.....	32
TABEL 3.5	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.....	33
TABEL 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian dokumen Renja mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022;
3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
4. Dana Indikatif Pelaksanaan Program Kegiatan;

Penyusunan Renja tahun 2024 merupakan tahun Pertama dari penyelenggaraan RPD Kabupaten Biak Numfor yang disusun sebagai arah pembangunan untuk 3 tahun kedepan. Sebagai salah satu perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu satu tahun. Pelaksanaan program kegiatan rencana kerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2024-2026.

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang termuat didalam dokumen RPD kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

RENJA Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Bupati 64 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
13. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor ..... tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun dengan maksud memberikan arah dan acuan dalam penentuan program Prioritas Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda adalah:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor secara sistematis dan terorganisir
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA) Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

- BAB I : **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022**  
menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda tahun 2022, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fung Bappeda.
- BAB III : **Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor**, menjelaskan keterpaduan telaahan dokumen perencanaan terhadap kebijakan nasional, kebijakan provinsi Papua kemudian mensinergiskan dengan tujuan dan sasaran renja OPD serta memuat program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Biak Numfor tahun 2024.
- BAB. IV : **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**, berisi rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah
- BAB. V : **Penutup**, berisi ringkasan RENJA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Kerja dan rencana tindak lanjut Bappeda Kabupaten Biak Numfor.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022**

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda.

Pada Penyusunan akhir Renja Perangkat Daerah Bappeda pada tahun 2022 sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur sehingga pemetaan usulan sudah berbasis Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga jumlah program dan kegiatan lebih ramping.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi, sehingga untuk penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022.

Bappeda Biak Numfor di tahun 2022 melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah **Rp. 20.102.633.375,-** (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung (Pegawai) sebesar **Rp. 5.683.899.120,-** (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapn Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dan Belanja Teknis sebesar **Rp. 14,418,734,255.00,-**

(Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17,521,813,250.00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 87.16%. Pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran**

No		Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran			
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input % (Keuangan)		Output	Outcomes
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					Rp	%		
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>20,102,633,375.00</b>						
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>6,559,459,900.00</b>						
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>949,998,500.00</b>						
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	749,998,500.00			706,184,500	94.16	100%	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00			126,000,000	63	100%	

	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,323,954,000.00</b>						
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	623,954,000.00			561,554,000	90	100%	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000.00			694,426,000	99.2	100%	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4,285,507,400.00</b>						
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3,236,332,400.00			2,723,761,900	84.16	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,049,175,000.00			1,027,271,500	97.91	100%	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3,173,932,500.00</b>						

	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>639,310,000.00</b>						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	639,310,000.00			639,070,000	99.96	100%	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1,054,622,500.00</b>				-		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,000,000.00			-	-		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400,000,000.00				-		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	454,622,500.00			448,448,000	98.64	100%	

	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1,480,000,000.00</b>						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	330,000,000.00			329,779,000	99.93	100%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1,150,000,000.00			968,776,000	84.24	84.24	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10,369,240,975.00</b>						
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14,690,000.00</b>						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,690,000.00			14,690,000	100	100%	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,722,239,120.00</b>						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,675,659,120.00			5,379,410,090	94.78	100%	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46,580,000.00			39,325,000	84.42	100%	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>244,365,000.00</b>						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	149,933,000.00			84,912,300	56.63	100%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94,432,000.00						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,654,404,725.00</b>						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,000,500.00			39,000,000	100	100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,024,900,225.00			864,539,500	84.35	84.35%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000,000.00			150,000,000	100	100%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,440,504,000.00			1,333,701,460	92.59	100%	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>405,850,620.00</b>						
	Pengadaan Mebel	110,078,650.00			110,000,000	99.93	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295,771,970.00			295,700,000	99.98	100%	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>617,024,260.00</b>						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,298,000.00			12,298,000	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240,966,260.00			167,528,000	69.52	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,000,000.00			2,300,000	10.45	10.45%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341,760,000.00			314,760,000	92.1	100%	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>710,667,250.00</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,660,000.00			99,580,000	47.05	47.05	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199,980,000.00			199,870,000	99.94	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299,027,250.00			188,928,000	63.18	63.18	

Dari uraian pada tabel 2.1 diatas, tergambaran Evaluasi Capaian indikator Kinerja tahun 2022 dari masing–masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, tetapi terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 90% tidak mencapai target realisasi keuangan, namun target fisik telah maksimal dilaksanakan.

Adapun dari sembilan 8 (Delapan) sub kegiatan yang dimaksud, sbb ;

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, mencapai 84,42%
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mencapai, 56,63%
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 84.35%
- d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai, 69.52%
- e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor mencapai, 10,45%
- f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mencapai, 47,05%
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mencapai, 63,18%

Berdasarkan kondisi dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian realisasi keuangan hanya mencapai 89.65% dari pagu program yang akan dicapai. Hal ini menggambarkan perlu adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan tahun 2022 guna menunjang pelayanan Kinerja administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, 6 (enam) sub kegiatan, tetapi terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang persentase keuangan dibawah 90% tidak mencapai target realisasi keuangan, namun target fisik telah maksimal dilaksanakan.

Adapun dari 2 (dua) sub kegiatan yang dimaksud, sbb ;

- A. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, mencapai 63,00%
- B. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, mencapai 84,16%

Berdasarkan kondisi dari 2 (dua) sub kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan juga adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian realisasi keuangan hanya mencapai 89.02% dari pagu program yang akan dicapai guna menunjang pelayanan kinerja teknis perencanaan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, 6 (enam) sub kegiatan, tetapi terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang persentase keuangan dibawah 90% diantaranya 2 sub kegiatan yang kinerja keuangan dan fisik 0%, sehingga kinerja tidak mencapai target realisasi keuangan yang optimal.

- a. Adapun dari 2 (tiga) sub kegiatan yang dimaksud, sbb ; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), 0%
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, 0%
- c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, mencapai 84,24%

Dari kondisi 3 (tiga) sub kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan juga adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian realisasi keuangan

hanya mencapai 75.18% dari pagu program yang akan dicapai guna menunjang pelayanan kinerja teknis perencanaan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Gambaran dari evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat di simpulkan bahwa harus adanya perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah yang mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun yang akan datang sehingga lebih maksimal dalam pengelolaan perencanaan daerah yang lebih baik.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2022**

Bappeda Kabupaten Biak Numfor melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor maupun dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian juga Lembaga Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan berkelanjutan;

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, Bappeda Biak Numfor melaksanakan Urusan Perencanaan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, sehingga pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

### **2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala Bappeda Kabupaten Biak Numfor bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Bappeda dalam urusan sebagai pelaksana Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai Perencana Bappeda diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang mampu menyusun perencanaan, menetapkan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan rencana sehingga harus didukung dengan kualitas SDM perencana serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mampu mengolah sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM perencana yang memadai;
2. Penyediaan hasil-hasil teknokratik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif;
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Kabupaten dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Unsur Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komunitas dan akademisi. Hal ini selaras guna mewujudkan pembangunan biak numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result).
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting)
4. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan reward and punishment yang jelas.
5. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

### **2.3.2 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Unsur Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Biak Numfor dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR

#### 3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan untuk menjawab sasaran pembangunan Nasional, ditetapkan 8 (delapan) Arah dan kebijakan makro tahun 2024 yakni (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Bappeda Kabupaten Biak Numfor sebagai instansi teknis yang memiliki tugas membantu Bupati sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

RKPD tahun 2024 merupakan tahapan pertama periode pelaksanaan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Selain itu perumusannya harus memperhatikan kondisi yang sedang berlangsung (*existing condition*) dalam pembangunan yang tengah dilakukan, yang mana pertumbuhan ekonomi masih menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga perumusan tema pembangunan daerah yang ditetapkan adalah **“Memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, demi terwujudnya Biak Numfor yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan”** Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang merata, maka di rumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 Provinsi Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dalam mewujudkan Papua Produktif fokus pembangunan tahun 2024 yang dirumuskan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu: mewujudkan Papua Produktif, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kabupaten Biak Numfor juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua. Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Papua, serta RPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026, prioritas pembangunan tahun 2024 dilaksanakan dengan tema “Memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, demi terwujudnya Biak Numfor yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan”, dengan sasaran utama:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan.
4. Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk
5. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat
6. Meningkatnya Produksi Perikanan
7. Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata
8. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dan Ekspansi Produksi Lokal
9. Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing
10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar
11. Menigkatnya Kualitas Lingkungan Sehat
12. Meningkatnya Penyelenggaraan Tranportasi
13. Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika
14. Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat
15. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani

Sebagai gambaran tindak lanjut dari sasaran pembangunan dalam menjawab tema pembangunan maka dapat terlihat dalam tabel 3.1 tujuan sasaran dan indikator tujuan sasaran

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>TERGET 2024</b>
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.75
		Harapan Lama Sekolah	14.32
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68.7
	Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Pemuda Terampil	61
		Persentase Prasarana Olah Raga Berstandar Nasional dan Internasional	90
		Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestariakan	75
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.1
		Indeks Pembangunan Gender	90.43
	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	24.06
		Gini Rasio	0.369
		Rasio Penduduk Ber KTP	9.97
		Total Fertility Rate	25
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Demokrasi	54.4
	Meningkatnya Pertumbuhan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing	Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	5
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dan Ekspansi Produksi Lokal	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4.5
	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4.33
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18.33
		Laju Inflasi	1.52
		Persentase pertumbuhan UMKM	20
	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Proporsi Penduduk/ Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79.52
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi		Cakupan Layanan Transportasi	60
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika		Cakupan Layanan Telekomunikasi	80
Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat		Indeks Resiko Bencana	Rendah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan Dan Melayani	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	Indeks Desa Membangun	0,5885
		Nilai AKIP	62,68
		Jumlah PERDA yang dihasilkan	7
		Opini BPK	WTP

Dengan target sasaran pembangunan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024**

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR	KINERJA WAWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Sasaran 2024	KINERJA AKHIR PERENCANAAN
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.53	10.75	10.97
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.21	14.32	14.43
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.5	68.7	68.9
4	Persentase Pemuda Terampil	Persen	48	61	87
5	Persentase Prasarana Olah Raga Berstandar Nasional dan Internasional	Persen	50	90	100
6	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestariakan	Persen	65	75	85
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69.47	73.1	76.91
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90.25	90.43	90.61
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24.25	24.06	23.69
10	Gini Rasio	Indeks	0.374	0.364	0.364
11	Rasio Penduduk Ber KTP	Persen	66.32	9.97	93.26
12	Total Fertility Rate	Per 1000 Perempuan	30	25	15
13	Indeks Demokrasi	Indeks	51.35	60.5	60.5
14	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Rupiah	15.39	15.52	15.65
15	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4	5	7
16	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Rupiah	4.37	4.5	4.64
17	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Rupiah	4.16	4.33	4.5

18	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Rupiah	18.17	18.33	18.5
19	Laju Inflasi	Persen	5.68	1.52	0.41
20	Persentase pertumbuhan UMKM	Persen	10	20	30
21	Proporsi Penduduk/ Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar	Persen	55	65	75
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	iIndeks	79.85	79.52	80
23	Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Lokasi	38	40	50
24	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	50	60	70
25	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60	80	100
26	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Sedang	Rendah	Rendah
27	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.5719	0,5885	0.5969
28	Nilai AKIP	Nilai	51.1	62,68	76.9
29	Jumlah PERDA yang dihasilkan	Jumlah Lokasi	7	7	7
30	Opini BPK	Disclaimer/ WDP/WTP	WTP	WTP	WTP

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA**

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Biak Numfor.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Biak Numfor memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Biak Numfor kurun waktu 3 tahun Nampak dalam Tabel 3.3 Dalam Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

**Tabel 3.3 Dalam Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas partisipasi dan tepat waktu
		Optimalisasi Koordinasi Antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kampung dan DPRD	Meningkatkan Manajemen SDM
		Peningkatan Kualitas Data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Penyediaan dan Pengolahan Data secara berkala dan berkesinambungan
	Meningkatkan validitas dan realibilitas data pembangunan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada BAPPEDA Kab. Biak Numfo	Peningkatan Kualitas Data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM Berbasis Kinerja
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan yang berkualitas			

Pencapaian Rentra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjawab kinerja perencanaan agar tepat sasaran dan bermanfaat serta memberikan nilai positif pada perencanaan dokumen di daerah yang sudah tergambarkan didalam tabel pencapaian Renstra, hendaknya dibarengi dengan indikator pencapaian Bappeda dalam rancangan Indikator Kinerja Utama bappeda 2024-2026 sebagaimana tabel 3.4 Berikut

**Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Awal Perencanaan Tahun 2023	Tahun			Kondisi Akhir Kinerja (2026)	Rumus
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	16.34	16.63	16.72	17.01	17.01	Agregat dari Presentase Capaian Target Nilai AKIP Kab. Biak Numfor (Komponen Perencanaan Kinerja)
Presentase konsistensi program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	Persen	65	70	75	80	80	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenan}}{\text{Jumlah Program RPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenan}} \times 100\%$
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	65	70	75	80	80	$\frac{\text{Jumlah Konsultasi Publik Dokrenda yg dilaksanakan}}{\text{Jumlah Konsultasi Publik Dokrenda yg direncanakan}} \times 100\%$
Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	Persen	70	75	80	85	90	$\frac{\text{Indikator Kinerja Makro Daerah Yang Tercapai}}{\text{Indikator Kinerja Makro Daerah Yang Direncanakan}} \times 100\%$

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan

**Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2024</b>
1	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	16.63
2	Presentase konsistensi program RKPD terhadap RPJMD (RPD	Persen	70
3	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	70
4	Persentase Capaian Target Kinerja Makro Daerah	Persen	75

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sasaran dari BAPPEDA yang tergambarkan di dalam IKU terjabarkan kedalam Program kerja yang merupakan kumpulan kegiatan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pelaksanaan tahun 1 (pertama) sebagai kinerja Perangkat Daerah yang di jabarkan kedalam Program/kegiatan dan Sub kegiatan, masing-masing 3 (tiga) rumusan program, 15 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Biak Numfor yaitu :

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			21.317.912.986,00					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.262.509.786,00					
	5.01	PERENCANAAN			21.068.317.766,00					
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indek Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan</i>	75	11.623.711.412,00					
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen administrasi keuangan PD</i>	80	6.575.028.250,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E-GOVERM ANT	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
				37	6.511.993.250,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/bulan					4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERN ANT	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	0 Laporan	63.035.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERN ANT
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai</i>	80%	1.030.821.500,00			-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERN ANT
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	45 Paket	66.526.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERN ANT
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	37 Dokumen	119.998.500,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERN ANT
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	17 Orang	844.297.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar 2. PENINGKATAN MUTU SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
5.01.01.2.06			<i>Persentase Tingkat Ketersediaan</i>	75%	3.046.023.780,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pemerintahan

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pelayanan Administrasi Umum PD</i>						4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	27.448.700,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	20.633.600,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN MUTU SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	1.069.226.480,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan</i>	0 Paket	154.196.000,00	Kab. Biak Numfor,	DANA TRANSFER	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan

			<i>Pengandaan yang Disediakan</i>			Samofa, Samofa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	0 Laporan	1.774.519.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Tingkat Ketersediaan BMD Perangkat Daerah</i>	80%	32.464.130,00			-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	8 Unit	32.464.130,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</i>	75%	470.947.352,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
				0 Laporan	14.000.000,00	Kab. Biak Numfor,	DANA TRANSFER	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			Samofa, Samofa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	73.427.352,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	383.520.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase pemeliharaan BMD Perangkat Daerah</i>	80%	468.426.400,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	199.550.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	48 Unit	211.934.400,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	56.942.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
			0	0 0	56.942.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	80%	4.680.362.354,00				
			<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (RKPD) dan Penganggaran (APBD)</i>	75%	1.509.244.000,00				

	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan</i>	80%	4.080.362.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANT
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	19 Berita Acara	212.660.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANT
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	19 Berita Acara	1.249.999.100,00	Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Fandoi Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANT
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							

			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>	19 Usulan	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Mansinyas	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	1 Dokumen	2.417.703.300,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Keterisian Data dan Informasi pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah</i>		70%	399.999.954,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNANCE
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	3 Buku	399.999.954,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	70%	1.509.244.000,00				-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	3 Laporan	550.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
				2 Laporan	959.244.000,00	Kab. Biak Numfor,	DANA TRANSFER	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan

			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT], DANA OTONOMI KHU SUS-KABUPATE N/KOTA PADA PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]		4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	200.000.000,00			-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
			<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat</i>	70%	1.000.000.000,00				
			<i>Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan</i>	70%	700.000.000,00				

			<i>Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>						
			<i>Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</i>	70%	1.555.000.000,00				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat</i>	80%	1.000.000.000,00			-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MENUJU E-GOVERNMENT
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang</i>	80%	700.000.000,00			-	-

			<i>Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>						
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	2 Laporan	500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS	-	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA EKONOMI KERAKYATAN SKALA KECIL DAN MENENGAH MELALUI Penguatan Potensial Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	1 Laporan	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</i>	80%	1.555.000.000,00			-	3. PERCEPATAN, PENINGKATAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS, PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN PERIKANAN MENUJU WISATA DAERAH DAN NASIONAL
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	1 Laporan	580.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA	-	3. PERCEPATAN, PENINGKATAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS, PEMBANGUNAN

						Semua Kel/Desa	OTONOMI KHUSUS		KEPA RIWISATAAN DAN PERIKANAN MENUJU IVEN WISATA DAERAH DAN NASIONAL
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemerataan Pem bangunan yang Berkel anjutan 3. PERCEP ATAN, PEN INGGKATAN DAN PEME RATAAN IN FRASTRU KTUR STR ATEGIS, P EMBANGU NAN KEPA RIWISATAA N DAN PE RIKANAN MENUJU IVEN WISATA DAERAH DAN NASIONAL
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	1 Laporan	675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 3. PERCEP ATAN, PEN INGGKATAN DAN PEME RATAAN IN FRASTRU KTUR STR ATEGIS, P EMBANGU NAN KEPA RIWISATAA N DAN PE RIKANAN MENUJU IVEN WISATA DAERAH DAN NASIONAL
	5.03	KEPEGAWAIAN			194.192.020,00				
1	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>TERLAKSANYA PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</i>	100%	194.192.020,00				
	5.01.02.2.01		<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang</i>	100%	194.192.020,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan

		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terlaksana Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik Terlaksana Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota terlaksana</i>						
			<i>Jumlah Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan terlaksana</i>	100%					4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E-GOVERMANT
				100%					
				100%					
				100%					
				100%					
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	194.192.020,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANTAPAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E-GOVERMANT
X		NON URUSAN			55.403.200,00				

	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			55.403.200,00				
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	55.403.200,00				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.403.200,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	55.403.200,00	Kab. Biak Numfor, Samofa, Samofa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan 4. PEMANT APAN SUMBER DAYA TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERSIH DAN AKUN TABEL MENUJU E -GOVERM ANT

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Biak Numfor di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda, prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman pada Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda
3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 agar menjaga tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
5. Dalam penyusunan RKA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. Begitu pula dalam penyusunan DPA dapat terjadi perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Selanjutnya Program dan Kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai indikator keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024.

Biak, 27 Maret 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor



**MICHAEL RONALD ISIR S.T**

PEMBINA TK'I

NIP. 19820304 200909 1 002



## **BURUNG MANGGAWOK** **(CRACTICUS CASSICUS)**

### **SELAYANG PANDANG BURUNG ENDEMIK KABUPATEN BIAK NUMFOR**

BURUNG MANGGAWOK ATAU DALAM NAMA ILMIAHNYA CRACTICUS CASSIUS ADALAH SALAH SATU DARI ENAM (ATAU TUJUH) ANGGOTA GENUS CRACTICUS YANG DIKENAL SEBAGAI BUTCHERBIRDS ATAU DALAM PENAMAAN DI INDONESIA DINAMAKAN BURUNG JALAK PAPUA.

BURUNG MANGGAWOK BERUKURAN PANJANG 32–35 CM, MEMILIKI BERAT BERKISAR ANTARA 130–170GRAM, DAN DAPAT BERTAHAN HIDUP HINGGA UMUR 20 TAHUN. PENAMPILAN JANTAN DAN BETINA SERUPA. BULUNYA DIDOMINASI WARNA HITAM DAN PUTIH, BURUNG MEMILIKI KEPALA, TENGGUK DAN TENGGOROKAN BERWARNA HITAM, BAGIAN BAWAH, PANTAT, DAN PUNGGUNG BERWARNA PUTIH, SERTA MANTEL HITAM PUTIH. EKORNYA BERWARNA HITAM, DENGAN UJUNG LEBAR BERWARNA PUTIH. PARUHNYA YANG KUAT BERWARNA ABU-ABU KEBIRUAN PUCAT DAN UJUNGNYA BERWARNA HITAM. IRISNYA BERWARNA HITAM ATAU COKLAT TUA, DAN TUNGKAI SERTA KAKINYA BERWARNA ABU-ABU TUA SAMPAI HITAM. BURUNG INI DAPAT DIBEDAKAN DARI BURUNG JAGAL PUNGGUNG HITAM DARI TENGGOROKANNYA YANG BERWARNA HITAM.

POPULASI BURUNG MANGGAWOK TERSEBAR DI HUTAN DATARAN RENDAH PADA AREA DATARAN TERBUKA KAWASAN HUTAN HUJAN, HUTAN DI BANTARAN SUNGAI, HUTAN RAWA, TEPIAN HUTAN, SERTA BERADA DI AREAL PERKEBUNAN DI PULAU PAPUA, YANG JUGA TERMASUK KEPULAUAN BIAK, KEPULAUAN YAPEN, DAN PULAU-PULAU KECIL DISEKITARNYA.



<https://bappeda.biakkab.go.id>



@bappedabiak22



+6281299165164

bappedabiak



@bappedabiak

